



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : HK.02.02/II/ 1406 /2021
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19
PADA KELOMPOK PRA LANSIA DAN HASIL BPOM
TERKAIT VAKSIN COVID-19 ASTRA ZENECA

Capaian vaksinasi COVID-19 per 27 Mei 2021 pada data dashboard KPCPEN adalah dosis 1 sebanyak 15,8 juta (8,75%) dan dosis 2 sebanyak 10,3 juta (5,73%) dengan laju vaksinasi tertinggi secara nasional adalah 508.510 pada tanggal 24 Maret 2021. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 diharapkan dapat diselesaikan di akhir tahun ini, agar *herd immunity* dapat segera tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Pemerintah memiliki rencana melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan target vaksinasi 1 (satu) juta dosis per hari melalui penyediaan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 yang memenuhi persyaratan mutu, efikasi dan keamanan. Mempertimbangkan pentingnya pencapaian target vaksinasi COVID-19.

Mengingat ketentuan,

1. Undang – Undang (UU) No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang – Undang (UU) No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
3. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
4. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseases* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Sasaran pemberian vaksinasi COVID-19 diperluas ke kelompok umur pra-lansia, dimulai dari usia 50 tahun ke atas. Kebijakan ini diambil dengan dasar kelompok pra-lansia adalah kelompok usia paling rentan kedua setelah lansia dan perlu dilindungi.
- Program vaksinasi mekanisme 2 banding 1, yaitu untuk satu orang usia 18 - 49 tahun dapat menerima vaksinasi bila membawa dua orang usia 50 tahun ke atas, hal ini dapat diimplementasikan sesuai kebijakan daerah masing-masing.
- Badan POM telah melakukan pemuktahiran informasi keamanan vaksin AstraZeneca betas CTMAV 547 yang disimpulkan bahwa tidak ada keterkaitan antara mutu Vaksin COVID-19 Astrazeneca nomor betas CTMAV547 dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dilaporkan. Untuk itu, Vaksin COVID-19 Astra Zeneca nomor betas CTMAV 547 dapat digunakan kembali.
- BPOM, Kementerian Kesehatan RI dan Komnas PP KIPI terus memantau keamanan vaksin yang digunakan di Indonesia dan menindaklanjuti setiap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.
- Segera melakukan koordinasi dan kerjasama percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan jajaran TNI, POLRI, komunitas, organisasi lokal, dan pihak swasta dalam mendukung capaian target vaksinasi COVID-19 di wilayah kerja masing – masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal surat ini diedarkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Mei 2021

Plt. Direktur Jenderal,



Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP 196405201991031003

Tembusan:

- Menteri Kesehatan RI
- Menteri Dalam Negeri RI
- Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI
- Kepala Pusat Kesehatan TNI
- Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan TNI
- Ketua Komnas PP KIPI